

Esensial Resolusi dalam Konflik Masyarakat

Madani

Jefri Antonius Gulo ¹⁾, Muhammad Hidayat ²⁾, Relly Anjar Vinata Wisnu Saputra ³⁾, Abdul Harits ⁴⁾ & Natasya Herlianti ⁵⁾

- 1)Program Studi Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia
- 2)Program Studi Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia
- 3)Program Studi Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia
- 4)Program Studi Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia
- 5)Program Studi Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia

Diterima: 30 September 2023; Disetujui: 30 Oktober 2023; Dipublish: 30 Desember 2023

*Corresponding Email: jefrigulo01@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku bangsa.Potret keragaman budaya, suku, agama, bahasa, ras dan seni menimbulkan suasana kesatuan dalam keragaman atau *unity in diversity* yaitu kesatuan dalam keragaman yang rentan menyebabkan terjadi konflik social.Konflik berasal dari kata latin *configere*, yang berarti dua orang atau kelompok dapat saling menyerang lebih hebat, saling melukai bahkan membunuh.Konflik biasanya bersifat negatif karena pihak yang berkonflik cenderung saling bertentangan dan berusaha untuk menghilangkan satu sama lain, lawan dipandang sebagai lawan atau musuh. Suatu upaya social untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang berkonflik disebut dengan resolusi konflik.Metode yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah studi kepustakaan.berupa buku-buku dan jurnal ilmiah.terkait resolusi konflik.Peranan komponen masyarakat madani (*civil society*) dalam konflik social menjadi suatu hal yang urgent dalam pemerintahan, melalui kemauan dan kemampuan serta komitmen antar komponen dengan prioritas pengembangan dan implemtasi nilai-nilai masyarakat madani disertai strategi *contending, problem solving, yielding, inaction dan withdrawing*.

Kata Kunci: Resolusi, Konflik, Masyarakat Madani.

Abstract

Indonesia is a country with various ethnic groups. The portrait of cultural diversity, ethnicity, religion, language, race and art creates an atmosphere of unity in diversity or unity in diversity, namely unity in diversity which is vulnerable to causing social conflict. Conflict comes from the Latin word configure, which means two people or groups can attack each other more violently, injure each other and even kill. Conflicts are usually negative because conflicting parties tend to contradict each other and try to eliminate each other, opponents are seen as opponents or enemies. A social effort to reach an agreement between parties who conflict resolution is called conflict resolution. The method used in this scientific work is library research. In the form of books and scientific journals. Related to conflict resolution. The role of civil society components in social conflict becomes an urgent matter in government, through the will and interpersonal skills and commitment components with priority development and implementation of civil society values along with strategies for contending, problem solving, yielding, inaction and withdrawing.

Keywords: Resolution, Conflict, Civil Society.

How to Cite: Gulo J.A., Hidayat M., Saputra R.A.V.W., Harits A., & Herlianti N. 2023. Esensial Resolusi dalam Konflik Masyarakat Madani. *Journal of Publik Administration & Policy Review*. 1 (1): 69-82

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan banyak suku bangsa. Keberagaman ini dibentuk oleh masyarakat Indonesia yang heterogen, yang tersebar di berbagai wilayah mulai dari pedesaan hingga perkotaan. Di negara kita terdapat kurang lebih 962 suku bangsa serta 239 bahasa yang berbeda-beda. Faktor-faktor ini menunjukkan keragaman bangsa. Keberagaman tersebut menciptakan kondisi kesatuan dalam keberagaman. Semua faktor tersebut dapat menimbulkan konflik sosial. Konflik berasal dari bahasa Latin *configere*, yang berarti bahwa dua individu atau kelompok dapat saling menyerang, melukai, dan bahkan membunuh dengan kekerasan.

Konflik adalah bagian dari hidup di dunia yang terkadang tidak dapat dihindari. Konflik biasanya bersifat negatif karena pihak yang berkonflik cenderung untuk berdebat dan berusaha untuk menghilangkan atau menghilangkan satu sama lain, lawan dipandang sebagai lawan atau musuh.

Menurut Ranupandoyo dan Hasnan (1990) konflik ialah suatu ketidaksetujuan organisasi/lembaga serta kelompok tertentu karena perbedaan kepentingan, tujuan, nilai-

nilai yang diyakini dan sebagainya, ketidaksetujuan ini disebabkan karena masing-masing organisasi memperebutkan sumber daya langka yang akan digunakan. Sementara Niniek dan Yusniati (2007) mendefinisikan konflik sebagai suatu kondisi yang muncul disebabkan oleh beberapa kekuatan yang saling bertentangan.

Di Indonesia, konflik-konflik yang muncul pasca reorganisasi dan berlanjut selama reformasi merupakan indikasi perbedaan-perbedaan pendapat yang terdapat dalam masyarakat, kemudian menimbulkan persoalan yang menentukan di berbagai tempat. Konflik yang diakibatkannya horizontal dan vertikal. Horizontal artinya pertikaian timbul dalam kelompok masyarakat yang berbeda. Sedangkan vertikal timbul dalam pusat dan daerah. Pertentangan etnis Madura dengan Dayak tercatat dua belas kali tahun 1950 dan 1999, termasuk dalam 2 Sriyono, Surajiyo – 1999, dimana penggulingan Martinus Amati (180 di Samantan). Kematian beliau menimbulkan sikap prihatin bagi masyarakat Dayak Samalantani). dan Sanggau Ledo, pengadilan antara orang Madura dan orang Dayak,

bersamaan dengan kerusuhan antara orang Sambas dan kelompok Madura (Petebang, Edi dan Eri Sutrisno, (2000). resolusi konflik adalah solusi yang diajukan untuk menyelesaikan pihak-pihak yang berkonflik. Menurut Coser, hal terpenting dalam resolusi adalah menghindari dominasi satu pihak atas pihak lain. Sementara itu, menurut Mindes (2006), menyelesaikan perselisihan adalah bagian penting dari pembangunan sosial.

Resolusi konflik dimaksudkan sebagai upaya sosial untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mengakhiri konflik. Coser kemudian menggunakan istilah resolusi konflik sebagai bentuk upaya resolusi konflik. Penyelesaian konflik tercapai ketika pihak-pihak yang berkonflik memiliki pemahaman yang sama dan mencoba menyepakati beberapa norma atau aturan yang mengarahkan mereka pada kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Pendidikan merupakan wahana penting dan alat yang ampuh untuk standar pengajaran, penyebaran nilai dan mendorong etos kerja di anggota masyarakat. Pendidikan juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat kepribadian bangsa,

memperkokoh jati diri bangsa, dan memperkuat jati diri bangsa dan Bhinneka Tunggal Ika yang harus senantiasa dijiwai oleh semangat kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai persatuan dalam Janji Pemuda merupakan kekuatan penting untuk membangun nilai-nilai luhur nasionalisme dan pola hidup pancasila bangsa Indonesia dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berdasarkan uraian resolusi konflik pada masyarakat sipil Indonesia di atas, penelitian ini akan membahas resolusi konflik yang tepat dan efektif pada masyarakat sipil Indonesia.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam menghadapi situasi chaos masyarakat akibat konflik yang terjadi ialah pengoptimalan masyarakat madani (civil society). Nurcholis Madjid mengartikan istilah civil society sebagai masyarakat madani yang berasal dari kata madinah, dimaknai sebagai masyarakat yang memiliki sopan santun serta beradab. Sementara itu, Suryanto (2018) mengatakan bahwa golongan intelektual atau mahasiswa, golongan kelas menengah, dan golongan arus bawah ialah tiga agen utama yang berperan penting dalam merealisasikan civil

society. Masyarakat madani bukan hanya sebagai warga negara yang memiliki hak maupun kewajiban namun berperan sebagai alternatif pemecahan problem social yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat dengan membangun ikatan solidaritas kemanusiaan untuk mencapai kebaikan bersama.

Dari latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dikatakan bahwa peranan komponen masyarakat madani (civil society) dalam konflik social menjadi suatu hal yang urgent dalam pemerintahan, melalui kemauan dan kemampuan serta komitmen antar komponen dengan prioritas pengembangan dan implementasi nilai-nilai masyarakat madani.

METODE PENELITIAN

Almack mendeskripsikan karya ilmiah sebagai suatu penerapan prinsip logis terhadap penemuan. Adapun metode dalam karya ini adalah studi literatur. Menurut Nazir (2003) studi kepustakaan ialah suatu bentuk penelaahan terhadap buku, literatur, serta berbagai macam laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Senada dengan itu, Mestika Zed

(2003) mengartikan studi pustaka sebagai rangkaian metode kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data kepustakaan, pencatatan dan pengolahan data tersebut.

Menurut George dalam Djiwandono (2015) studi pustaka ialah suatu hal yang berkaitan dengan pencarian sumber atau opini pakar terkait topik penelitian. Sementara menurut Sugiyono (2017) mendeskripsikan bahwa studi kepustakaan berkaitan dengan nilai-nilai yang dipercaya, norma serta budaya masyarakat. Dengan ini penulis menggunakan studi kepustakaan berupa buku-buku dan jurnal ilmiah terkait dengan Resolusi Konflik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Resolusi konflik atau conflict resolution dalam pandangan Burton ialah suatu upaya transformasi hubungan yang berkaitan dengan mencari jalan keluar dari suatu perilaku konfliktual sebagai suatu hal yang utama.

Menurut Scannell (2010) terdapat beberapa aspek yang berpengaruh terhadap individu dalam meresolusi konflik seperti keterampilan berkomunikasi, kecerdasan emosi,

kepercayaan terhadap sesame serta kemampuan menghargai perbedaan.

Sedangkan Pruitt dan Rubin memperkenalkan dual concern model (model kepedulian rangkap dua) yakni suatu teori dasar dalam penyelesaian konflik berdasarkan kepedulian oleh diri sendiri dan orang lain melalui lima strategi antara lain :

1. Contending (bertanding)

Contending ini dapat dimaknai dengan suatu usaha resolusi konflik yang memprioritaskan aspek kapabilitas dari suatu pihak yang berkonflik tanpa menghiraukan kepentingan-kepentingan dari pihak lain.

2. Problem Solving

Merupakan gagasan dari solusi permasalahan yang terjadi dengan mengkolaborasikan Teknik rekonsiliasi.

3. Yielding

Yielding ialah suatu strategi dimana terdapat penurunan egoisme kepentingan terhadap pihak lawan.

4. Inaction

Yakni strategi tanpa aksi (diam) dengan memperhatikan pola atau pun perkembangan dari konflik yang sedang terjadi.

5. Withdrawing

Dalam berbagai literatur, withdrawing ini diartikan sebagai

tindakan undur diri atau situasi yang mengharuskan untuk meninggalkan konflik.

Pruitt dan Robin (2009) menambahkan bahwa dalam memutuskan mata rantai konflik dalam masyarakat tidak akan ditemui satu strategi yang sangat efektif, maka perlu penggabungan dari beberapa strategi diatas disertai kemampuan yang konstruktif dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

Secara etimologis, konflik adalah pergumulan, pertengkaran tentang pendapat atau keinginan; atau pemecatan; kebalikan dari oposisi; atau sebaliknya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konflik berarti pertengkaran; Perselisihan; Sementara itu, dalam kosa kata sosiologis, konflik berarti perjuangan terbuka antara individu atau kelompok dalam masyarakat atau antar negara bangsa, yaitu konflik terbuka antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat atau antar negara.

Ada beberapa asumsi dasar dalam teori konflik ini. Teori konflik merupakan kebalikan dari teori fungsi struktur, dimana teori fungsi struktur lebih menekankan ketertiban dalam masyarakat. Teori konflik mengkaji konflik dan konflik dalam sistem sosial. Menurut teori konflik, masyarakat tidak

selalu benar. Buktinya pasti bahwa di beberapa masyarakat ada kesalahpahaman. Teori konflik juga berbicara tentang penulis yang berbeda.

Otoritas yang berbeda ini mengarah pada dominasi dan penaklukan. Perbedaan antara superioritas dan subordinasi dapat menimbulkan konflik kepentingan. Menegaskan bahwa konflik diperlukan untuk membawa perubahan sosial. Sementara fungsionalis struktural mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat selalu terjadi pada titik keseimbangan, teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan oleh konflik kepentingan.

Sorjono Soekanto (1989:90) Herlina Astri mengklasifikasikan bentuk dan jenis konflik tersebut sebagai berikut:

1. Konflik pribadi. Konflik muncul dalam diri seseorang terhadap orang lain. Paling sering, konflik pribadi dimulai dengan perasaan tidak suka pada orang lain, yang pada gilirannya mengarah pada perasaan benci yang mendalam. Perasaan ini mendorong mereka untuk mengkritik, menghina, dan bahkan menghancurkan pihak lain. Pada dasarnya, sering terjadi konflik pribadi di masyarakat.

2. Konflik rasial. Konflik rasial biasanya terjadi di negara yang memiliki suku dan ras yang berbeda. Ras adalah sekelompok orang berdasarkan ciri-ciri biologisnya seperti bentuk wajah, bentuk hidung, warna kulit, dan warna rambut. Secara garis besar, ras-ras yang ada di dunia diklasifikasikan menjadi lima ras, yaitu Australoid, Mongoloid, Negroid-Kaukasia, dan Ras Khusus. Artinya, ada potensi konflik dalam kehidupan dunia ketika perbedaan ras diperparah.

3. Konflik antar kelas sosial. Adanya kelas-kelas dalam masyarakat karena sesuatu yang bernilai seperti kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan. Semua itu menjadi dasar pengelompokan seseorang ke dalam kelas sosial, yaitu kelas sosial atas, menengah, dan bawah. Seseorang yang memiliki banyak kekayaan dan kekuasaan berada pada posisi tertinggi sedangkan seseorang yang tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan berada pada posisi terendah. Setiap kategori mencakup hak dan kewajiban serta berbagai manfaat. Jika perbedaan tersebut tidak dapat diatasi, kondisi tersebut dapat memicu konflik rasial.

4. Konflik politik antar

kelompok dalam masyarakat dan antar negara merdeka. Dunia politik tidak lepas dari munculnya konflik sosial. Kebijakan adalah prosedur untuk menghadapi atau mengatasi suatu masalah. Konflik politik muncul karena masing-masing kelompok sosial mengikuti kebijakan yang berbeda ketika menghadapi masalah yang sama. Perbedaan ini menciptakan peluang terjadinya konflik antar kelompok. Contoh rencana pornografi dan undang-undang pornografi sedang dikaji, masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua sehingga menimbulkan konflik antara kelompok orang yang setuju dan kelompok yang tidak setuju.

5. Konflik Internasional. Konflik internasional biasanya timbul dari perbedaan kepentingan yang mempengaruhi kedaulatan negara lawan. Karena menyebar ke seluruh negeri, konsekuensi dari konflik ini dirasakan oleh semua orang di negara itu.

Konsep masyarakat sipil oleh H. Aceng Kosasih M.Ag merupakan konsep universal, sehingga perlu adaptasi dan sosialisasi jika konsep tersebut akan diterapkan di Indonesia, karena konsep masyarakat sipil berasal dari masyarakat asing. Agar konsep tersebut dapat

terrealisasi dalam wacana masyarakat Indonesia, diperlukan suatu konsep, langkah-langkah yang berkesinambungan dan sistematis yang dapat mengubah paradigma, kebiasaan dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Selain itu, konsep masyarakat madani merupakan konsep yang relatif baru bagi masyarakat Indonesia dan bukan merupakan tugas yang mudah karena terkait dengan budaya dan sikap masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai terobosan dalam penciptaan konsep dan ukuran, yaitu paradigma baru untuk mengatasi tuntutan baru.

Civil society atau masyarakat sipil secara umum dapat diartikan sebagai masyarakat atau pranata sosial dengan ciri-ciri sebagai berikut: Kemandirian, toleransi, kemandirian, keinginan untuk saling membantu dan mengikuti norma dan etika yang disepakati bersama (Syamsudin, 1998:12). Definisi istilah masyarakat sipil sangat tergantung pada kondisi sosial budaya bangsa, karena istilah masyarakat sipil pada akhirnya merupakan konstruksi konseptual yang muncul dari perjuangan masyarakat Eropa Barat. Sebagai titik awal, beberapa definisi masyarakat oleh para ahli yang berbeda dari berbagai negara disajikan di sini, menganalisis dan menyelidiki fenomena masyarakat sipil

ini.

Menurut Tilar (1999:155-156) di Surajiyo masyarakat borjuis (masyarakat borjuis) ini memiliki ciri-ciri:

1. Pribadi yang mengedepankan hakikat kemanusiaan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup, melainkan menjadi manusia yang bermartabat.

2. Menjunjung tinggi kehidupan antar masyarakat dalam bentuk organisasi sosial seperti negara. Negara menjamin dan membuka peluang-peluang yang menguntungkan bagi para anggotanya untuk berkembang menuju realisasi diri. Hubungan komunikasi yang terjalin sangat penting, sebab tidak adanya keselarasan dengan Tuhan Yang Maha Esa, proses interaksi masyarakat sungguh tidak bermakna. Sumber nilai yang mengatur seluruh kehidupan manusia adalah dekat Kepada-Nya.

3. Bagi yang sadar kualitas ini adalah mereka yang menghargai HAM berdemokrasi, yang disebut masyarakat madani.

Masyarakat adalah kelompok yang saling bertikai akibat ketidak stabilan struktur, disebabkan kepentingan-kepentingan tertentu seharusnya di tiadakan. Semua

ini dapat dihindari dengan transformasi sosialis masyarakat (Yusmar Yusuf, 1988:47). Hendaknya nilai yang dianut tidak di pandang sebagai kepentingan perbedaan.

M Wahid Nur Tualeka dari Ralf Dahrendorf, gambaran Marx tentang manusia sosial lebih bersifat kolektif, holistik dan organik. Pada saat yang sama, itu lebih individualistis menurut teori konflik. Menurut Vilfredo Pareto, mekanisme masyarakat elite terus berubah. Konflik tidak dapat dihindarkan karena sifat masyarakat, pasti terdapat keinginan yang berbeda dan berubah. (Yusmar Yusuf, 1988:48) Sebuah kelompok dianggap aman ketika terjadi perbedaan pendapat antar setiap anggota. Ini adalah keinginan kelompok untuk menentukan jenis interaksi yang mereka inginkan dan menganggapnya berharga secara berkelanjutan.

Adanya kelompok penyebab munculnya konflik, ketika terjadi menimbulkan pertentangan antara individu anggota. Konflik dapat timbul karena pemberlakuan norma yang berlaku tidak diterima oleh individu dan kelompok yang ada. Selain itu, dapat muncul dari klasifikasi yang tidak disengaja dalam suatu kelompok, keterampilan yang lebih lemah dibandingkan dengan anggota kelompok

lainnya, dan akhirnya juga dari kohesi kelompok yang sangat rendah, yaitu. H. ketidakmampuan individu anggota kelompok untuk menyesuaikan tindakan dan pandangannya. (Yusmar Yusuf, 1988:90).

Konflik mengancam keteraturan dalam kelompok, akan tetapi muncul ketika tidak mampu mendefinisikan nilai yang diberlakukan, dan disini lagi fungsi ketua adalah menggerakkan situasi, menggerakkan kelompok. mencapai tujuan kelompok. Konflik muncul dari persaingan, baik antar individu maupun antar kelompok.

Adapun resolusi sebagai upaya penyelesaian sekaligus pencegahan terjadinya konflik dalam masyarakat madani adalah adanya pendidikan multicultural dan kearifan local sebagai upaya resolusi konflik.

Multikulturalisme merupakan idealisme yang dapat menjadi alat atau sarana untuk mengangkat kemanusiaan dan kemanusiaan (Suparlan, 2002 dalam Irsyaadul Ibaadi, Fita Tryana dan Rachmad Sukriyanto). Di sisi lain, menurut Suparlan (2002) Reed (1997), multikulturalisme adalah pembentukan masyarakat yang lebih besar di mana objek-objeknya mengandung semua budaya dari komunitas terkecil dan memiliki budaya pada masa itu.

Pendidikan multikultural adalah pendekatan berbasis nilai demokrasi untuk pendidikan dan pembelajaran yang mendorong perkembangan pluralisme budaya dengan cara yang hampir universal. Pendidikan multikultural adalah upaya untuk mengembangkan kurikulum yang mencapai kesetaraan pendidikan, mempromosikan pemahaman kelompok etnis, dan menekan praktik-praktik yang menindas.

Pendidikan multikultural adalah reformasi sekolah secara menyeluruh dan pendidikan dasar bagi semua siswa, melawan segala bentuk diskriminasi dan penindasan di dalam kelas, relasi kelas dan prinsip demokrasi keadilan sosial (Ibrahim, 2013:138). Secara sederhana, pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pembentukan keragaman budaya yang merespon perubahan demografis dan budaya pada komunitas tertentu atau dunia pada umumnya (Ibrahim, 2013). Pendidikan multikultural mengajarkan Anda untuk menghargai keragaman, terutama keragaman Indonesia yang sangat beragam dengan ras, suku, budaya, agama, dan kelompok sosial yang berbeda.

Pelaksanaan pendidikan multikultural dapat dilakukan secara

bertahap, mulai dari perencanaan kurikulum hingga pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Ketika beberapa komponen yang diperlukan untuk pembelajaran dirancang dengan baik, mereka digunakan dalam kegiatan belajar mengajar.

Pendidikan multikultural ini dapat diwujudkan melalui pembelajaran di setiap lembaga pendidikan formal, kegiatan ekstrakurikuler dan perilaku sehari-hari. Untuk mencapai hasil yang terbaik, pelaksanaan pendidikan multikultural juga harus didukung oleh lembaga pendidikan lainnya, yaitu pendidikan keluarga dan pedagogi sosial.

Beberapa pendekatan dapat diterapkan untuk mengimplementasikan pendidikan multikultural, yaitu pendekatan masukan, pendekatan aditif, pendekatan transformasional dan pendekatan aksi sosial. Pendekatan ini diterapkan dengan memasukkan nilai-nilai pendidikan multikultural ke dalam materi pembelajaran dan budaya sekolah.

Kearifan lokal dapat diartikan sebagai kebijakan yang berasal dari cara hidup tradisional, berdasarkan budaya yang muncul dan bertransformasi dari masyarakat, berdasarkan kepercayaan, adat istiadat. Tata nilai adat dan budaya

merupakan pedoman yang harus diikuti oleh setiap anggota masyarakat, terutama dalam sikap dan perilaku, serta menjadi acuan untuk menilai dan mengamati tindakan dan perilaku individu dan kelompok.

Basyir, K. et al., (2013:262-264) dalam Gustina, menjelaskan bahwa manfaat kearifan lokal antara lain sebagai berikut:

- (1) otonomi daerah
- (2) pengaruh sosial
- (3) penyelesaian konflik
- (4) merespon perubahan
- (5) membangun keunggulan lokal
- (6) menjaga alam dan lingkungan

Pertama, otonomi daerah merupakan indikasi kebutuhan masyarakat akan desentralisasi dalam membangun kearifan lokal untuk mengatasi berbagai permasalahan di negara berkembang. Pendekatan bottom-up menawarkan berbagai daerah berkesempatan untuk memperlihatkan profilnya, agar berbeda dari yang lain, serta nilai luhur, kebiasaan positif berkontribusi terhadap identitas produk didaerah.

Kebijakan yang menawarkan peluang bagi pengembangan kearifan lokal salah satu fungsi otonomi, kemudian menjadi dasar untuk menentukan kebijakan di berbagai

daerah di tingkat lokal. Basyir, K. et al., (2013:262) Gustina mencatat kebijakan dapat dikelola terdiri dari puskesmas, perkebunan, pengelolaan SDA, dan kegiatan pedesaan. Kearifan budaya lokal artinya menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya serta diterapkan padatradisi yang dianut.

Kedua, pemberdayaan masyarakat bagian dari kearifan lokal, karena masyarakat dapat diajak membangun kesadaran diri dalam menggali kemampuan terhadap lingkungannya. Kemudian pedoman manusia melakukan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan berdasarkan prinsip, nilai, norma, sikap, pengetahuan, keterampilan dan sumber daya.

Ketiga, pengurangan konflik yang digunakan sebagai alat menyelesaikan pertentangan dengan bantuan hukum melalui nilai lokal, sebagai fungsi dari kearifan lokal.

Keempat, respon terhadap perubahan adalah apresiasi masyarakat terhadap budaya baru yang berkembang tanpa meninggalkan identitasnya. Karena nilai-nilai kearifan lokal merupakan identitas masyarakat yang tidak mudah terhapus oleh budaya baru yang muncul. Budaya baru yang berkembang pun perlu diolah dan

diintegrasikan untuk memajukan budaya lokal sekaligus menunjukkan identitasnya yang khas.

Kelima, membangun keunggulan lokal adalah semangat dan energi untuk menunjukkan keunikan suatu daerah atau keunikan daerah lain. Keunikan dan keunikan inilah yang menjadi daya tarik magis masyarakat lainnya. Keunggulan lokal tersebut dapat berupa budaya, sumber daya alam dan alam. Suasana dan atraksi wisata serta produk-produk yang dikembangkan di sana berbeda atau khas dan unik dibandingkan dengan daerah lain.

Keenam, perlindungan alam dan lingkungan merupakan salah satu tujuan dari kearifan lokal. Di sisi lain, kearifan lokal juga merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam merencanakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan secara berkelanjutan.

Dengan adanya pendidikan multikultural dan kearifan lokal sebagai resolusi konflik, kami berharap dapat mewujudkan masyarakat madani yang berupaya mengangkat harkat dan martabat manusia ke posisi yang sebenarnya dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memberdayakan potensi dan

meningkatkan kesejahteraan rakyat. , serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya strategi pemberdayaan yang mampu memperluas kekuatan masyarakat sipil.

SIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa teori konflik merupakan kebalikan dari teori struktural-fungsional, dimana teori struktural-fungsional lebih menekankan pada ketertiban dalam masyarakat. Teori konflik mengkaji konflik dan konflik dalam sistem sosial. Sementara itu, konsep masyarakat sipil merupakan konsep universal yang harus diadaptasi dan disosialisasikan jika konsep ini akan diterapkan di Indonesia, karena konsep masyarakat sipil berasal dari masyarakat asing. Negara Indonesia terdiri dari berbagai budaya, suku, pulau yang sewaktu-waktu menimbulkan ketidakcocokan, sehingga harus disikapi dengan bijak.

Penyelesaian dengan resolusi yang tepat sangat dibutuhkan. Dengan demikian solusinya mencari sumber masalah dan penanganannya dengan melibatkan semua pihak yang bertikai, dan pemerintah harus mendorong serta menekankan pentingnya menggalakkan

pendidikan multicultural, sikap masyarakat belajar, berbasis kearifan lokal. Namun demikian, setiap kebijakan yang diambil mampu menyelesaikan konflik secara damai dalam masyarakat madani, dengan partisipasi seluruh elemen masyarakat, tetap menjunjung tinggi nilai pancasila, yaitu harus bersifat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Ideologi negara adalah dasar negara bagi Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Astri, H. (2011). *Penyelesaian konflik sosial melalui penguatan kearifan lokal*. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 2(2), 151-162.
- Gustina, G. (2017). *Membangun Masyarakat Belajar Berbasis Kearifan Lokal Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Madani*. *Proceeding IAIN Batusangkar*, 1(1), 327-340.
- Kosasih, A. (2000). *Konsep masyarakat madani*. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Sriyono, S., & Surajiyo, S. (2020, August). *Efektifitas Penyelesaian Konflik Sosial Secara Damal*. In *Seminar Nasional Psikologi UM* (Vol. 1, No. 1).
- Triyana, F., & Sukriyanto, R. (2022). *Pendekatan Pendidikan Multikultural Sebagai Resolusi Konflik Di Indonesia*. *Edusoshum: Journal of Islamic Education and Social Humanities*, 2(1), 139-149.
- Tualeka, M. W. N. (2017). *Teori konflik sosiologi klasik dan modern*. *Al-Hikmah*, 3(1), 32-48.
- Fisher, Simon dkk. *,Mengelola Konflik*.

Gulo J.A., Hidayat M., Saputra R.A.V.W., Harits A., & Herlianti N. Esensial Resolusi dalam Konflik Masyarakat Madani

Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak, Jakarta: The British Council, 2001

Pruit, Dean G. & Jeffrey Z Rubin, *Teori Konflik Sosial (terjemahan)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004

dan Aplikasi. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2009.

Suara Pembaharuan. 1999. *Masyarakat Madani Tercermin dalam Kedaulatan Rakyat*. Suara Pembaharuan: 21 Juni 1999.

Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori*